

PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL MELALUI STRATEGI *COMMUNITY BUILDING* POKDARWIS

I Ketut Mastika¹, Didik Eko Julianto², Sasongko³, Sri Wahyuni⁴
i.ketut.mastika@gmail.com

Abstract

This study focuses on community building strategy of Pokdarwis to increase capacity and competence as mobilizer group and strengthening local community participation in tourism village development in the region. The study was conducted at Alas Sumur and the tourism village of Karangmelok Bondowoso. The methods used are based on a paradigm of constructivism with a qualitative approach. The recommended result is the importance of the Pokdarwis to observe and meet the ideal requirements as a Pokdarwis membership, approach and communication and involve stakeholder support, as well as following the practice of community building. Conclusion suggests that the Pokdarwis tourism village of Alas Sumur in process of experience has had conformity with community building practices.

Keywords: *Community Participation, Pokdarwis, Tourism village, Community Based Tourism, and Community Building Strategy*

Abstrak

Kajian ini fokus pada strategi *community building* Pokdarwis untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sebagai kelompok penggerak dan penguatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata di wilayahnya. Kajian dilakukan di desa wisata Alas Sumur dan desa wisata Karangmelok Bondowoso. Metode yang digunakan didasarkan pada paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang direkomendasikan adalah pentingnya Pokdarwis untuk memperhatikan dan memenuhi persyaratan ideal sebagai keanggotaan Pokdarwis, melakukan pendekatan dan komunikasi serta melibatkan dukungan stakeholder, juga mengikuti praktik-praktik *community building*. Kesimpulan menunjukkan bahwa Pokdarwis desa wisata Alas Sumur secara proses pengalamannya telah memiliki kesesuaian dengan praktik *community building*.

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, Pokdarwis, Desa Wisata, Pariwisata Berbasis Masyarakat, dan Strategi Community Building*

^{1,2,3,4} Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

PENDAHULUAN

Manfaat dalam pengembangan pariwisata di pedesaan sangat didukung oleh karakteristik yang khas dari pariwisata itu sendiri, yaitu: (1) konsumen wisata mendatangi destinasi maupun objek dan atraksi wisata, sehingga membuka peluang bagi penduduk lokal (*host*) untuk memasarkan berbagai komoditi dan layanan wisata desa; (2) membuka peluang bagi pengembangan atau diversifikasi ekonomi lokal yang mampu menyentuh kawasan terpencil (*remote area*) yang justru menjadi kebutuhan wisatawan minat khusus karena adanya keunikan dan otentisitas alam serta budaya lokal; (3) Terbukanya peluang bagi usaha-usaha ekonomi padat karya yang berskala kecil dan menengah dalam memenuhi kebutuhan wisatawan (*tourism need*) yang terjangkau bagi kalangan marjinal; (4) Aset pengembangan pariwisata desa (desa wisata) tidak hanya mengandalkan modal finansial, namun didukung juga oleh modal sosial/modal budaya (*social/culture capital*) dan modal alam (*natural capital*) yang menjadi aset masyarakat lokal. Modal sosial masyarakat pedesaan (khususnya) terbentuk sebagai kristalisasi dari nilai-nilai kearifan lokal melalui proses konstruksi sosial (Mastika, I.K., 2017).

Pemberdayaan wisata lokal semakin memiliki urgensi selain karena memiliki peluang yang sangat potensial sebagai aspek pembangunan yang cukup dominan, baik di tingkat nasional maupun di desa pada khususnya. Selain itu, pembangunan pariwisata di pedesaan melalui pengembangan desa wisata merupakan bentuk pemerataan pembangunan melalui kepariwisataan yang dapat memperbesar *multiplier effect* dalam kesempatan kerja, peluang berusaha,

dan distribusi pendapatan. Fenomena kemanfaatan ekonomi yang positif ini memang banyak diakui dan dirasakan bagi negara-negara berkembang (beberapa negara di Afrika) dimana sumbangan pariwisata dirasakan cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi negara (Max dalam Damanik, J., 2005). Namun perlu diingat bahwa manfaat ekonomi yang dimaksud lebih dirasakan pada level ekonomi makro, sementara efek tetesan ke bawah (*trickel down effect*) dalam distribusi dan redistribusi sumberdaya pariwisata masih belum dirasakan secara signifikan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya kebijakan publik yang bersifat *affirmatif action*, yaitu kebijakan publik yang secara sengaja melakukan diskriminasi yang menguntungkan rakyat miskin (*pro poor tourism policy*).

Kebijakan publik yang memberi berbagai kemudahan dan sumberdaya pariwisata kepada penduduk miskin dengan tidak memberikan kepada unit-unit ekonomi yang berskala besar perlu menjadi pilihan. Selain itu, diperlukan penentuan pemilihan tipologi desa wisata yang tepat, dimana terdapat tiga model tipologi desa wisata, yaitu: tipe investor; tipe pemerintah; dan tipe masyarakat (Arida, N.S., 2016). Waddock (dalam Arida, 2016) memberikan pengertian tipologi sebagai model organisasional yang secara sistematis menggambarkan bagaimana fenomena sosial bervariasi atau serupa dalam kaitannya dengan atribut-atribut tertentu. Gee, Powers, dan Mansfeld (dalam Arida, 2016) tipologi ekowisata menjadi penting dalam pencitraan destinasi, bermanfaat untuk mengetahui pola kunjungan, motivasi, strategi promosi dan pemasaran, alat perencanaan yang efektif, sebagai petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dampak spasial, tolok

ukur pertumbuhan, dan instrumen dalam menyusun formulasi kebijakan pariwisata.

Kebijakan kepada *pro poor tourism policy* ini memerlukan langkah-langkah strategis berupa strategi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan pariwisata lokal, serta mendorong terbentuknya kemandirian kelompok-kelompok sadar wisata di desa (*self-reliant development*) melalui program-program *community building* maupun *capacity building*. Keberhasilan dalam menumbuhkan kemandirian kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan desa wisata diharapkan akan mampu sebagai salah satu “unsur penggerak” dalam pengembangan pariwisata di wilayahnya serta mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di wilayah pedesaan.

Kabupaten Bondowoso sebelum-nya di kenal sebagai “kota mati” karena merupakan kabupaten yang tidak memiliki garis pantai dan dinamai sebagai kota pensiun. Bondowoso kini menampilkan sosok sebagai destinasi wisata yang layak dikunjungi wisatawan. Dengan diluncurkan brand destinasi pariwisata Bondowoso, yaitu “*The Highland Paradise*” serta berbagai usaha mempopulerkan citra pariwisata Bondowoso di dalam maupun di luar negeri, diharapkan destinasi wisata Bondowoso semakin dikenal masyarakat luas. Demikian pula dalam mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan, pemerintah kabupaten Bondowoso juga mengajak pemerintah desa untuk memanfaatkan potensi wisata unggulan agar dikemas dalam pengembangan desa wisata yang berbasis masyarakat. Mendorong pembentukan kelompok

swadaya masyarakat (Pokdarwis) yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah dan masyarakat) menuju kepada kemandirian masyarakat, khususnya bidang pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas lingkungan. Melalui pengembangan wisata alam serta wisata budaya mewujudkan destinasi wisata unggulan pedesaan berbasis produk unggulan desa yang berdaya saing tinggi dengan tetap berpijak pada keunikan/ciri khas lokal. Pembentukan Pokdarwis merupakan bidang praktik yang di arahkan pada penciptaan atau peningkatan komunitas (Muntu, 2018; Pakpahan, R., 2018).

Pembangunan desa wisata memerlukan dukungan dan keterlibatan seluruh stakeholder yang terkait. Masyarakat adalah salah satu unsur stakeholder inti untuk bersama-sama dengan pemerintah kabupaten atau kota serta pemerintah desa bersinergi melaksanakan dan mendukung pembangunan desa wisata. Oleh karena itu, pembangunan desa wisata memerlukan perhatian akan posisi, potensi, serta peran masyarakat baik sebagai subjek atau pelaku maupun sebagai penerima manfaat pengembangan desa wisata. Dukungan masyarakat turut menentukan keberhasilan jangka panjang pengembangan desa wisata. Dukungan masyarakat dapat diperoleh melalui penanaman kesadaran masyarakat akan arti penting pengembangan desa wisata. Diperlukan proses dan pengkondisian untuk mewujudkan masyarakat yang sadar wisata.

PERMASALAHAN

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata melahirkan pemikiran pembentuk-kan komunitas

penggerak pariwisata seperti Kompepar (kelompok penggerak pariwisata) maupun Pokdarwis (kelompok sadar wisata). Lahirnya komunitas seperti “Pokdarwis” adalah merupakan respon dari masyarakat sebagai kelompok swadaya dan swakarsa yang berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat lokal berupa kesiapan dan kepedulian dalam memberikan layanan wisata desa, serta berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi perkembangan desa wisata. Memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Keberadaan Pokdarwis tersebut perlu terus didukung dan dibina sehingga dapat berperan lebih efektif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif di kawasan pengembangan objek dan atraksi wisata di wilayahnya.

Berdasarkan pada urgensi kedudukan dan fungsi Pokdarwis, maka pertanyaan penting dalam kajian ini adalah: “Bentuk pemberdayaan seperti apa yang perlu diberikan kepada organisasi kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam meningkatkan kapasitas melakukan penguatan partisipasi masyarakat lokal di wilayahnya”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Desa Wisata

Wisata desa dengan pesona alam pedesaan dapat menjadi alternatif pilihan bagi pengembangan pariwisata yang semakin diminati, baik oleh masyarakat desa maupun oleh wisatawan. Pertimbangan wisatawan memilih wisata pedesaan karena desa

memberikan nuansa lain yang selama ini tidak ditemukan pada wisata modern. Wisata ke desa kemudian melahirkan konsep yang dikenal dengan ‘desa wisata’. Desa wisata merupakan sebuah kawasan yang berkaitan dengan wilayah atau berbagai kearifan lokal (adat-istiadat, budaya, alam). Kearifan atau sistem pengetahuan lokal, yakni pengetahuan yang khas yang merupakan milik suatu masyarakat atau budaya tertentu yang telah berkembang sekian lama, sebagai hasil proses hubungan timbal balik antara penduduk dengan lingkungannya (Hermawan, 2016).

“Desa wisata” biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata. Selain itu, fasilitas yang seyogyanya ada di suatu kawasan desa wisata antara lain: sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Khusus untuk sarana akomodasi, desa wisata dapat menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (*home stay*) sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asli.

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Terdapat 2 (dua) konsep utama

dalam komponen desa wisata, yaitu: (1) akomodasi; dan (2) atraksi. "Akomodasi" mencakup sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk. Selanjutnya "Atraksi" berkaitan dengan seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta seting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif, seperti: kursus tari, belajar bahasa, dan lain-lain yang spesifik (Nuryanti, 1993). Pengembangan desa wisata harus didasarkan pada 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu: (1) pengembangan berbagai fasilitas wisata dalam skala kecil dengan pelayanan di dalam atau di dekat desa; (2) fasilitas-fasilitas wisata yang ada harus dimiliki atau dikelola oleh penduduk setempat, baik secara individu maupun kelompok; (3) pengembangan didasarkan pada salah satu "sifat" budaya tradisional yang melekat pada suatu desa atau "sifat" atraksi dengan alam serta pengembangan desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan yang mengunjungi atraksi tersebut.

Ramuhan utama desa wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik, dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik serta eksotis khas daerah. Dengan demikian, pemodelan desa wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah (Sastrayuda, 2010).

Pearce (dalam Sidiq dan Resnawaty, 2017) mengartikan pengembangan desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara

untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumberdaya dan keunikan tradisi serta budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Disisi lain, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengkait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal. Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata mencakup keseluruhan tahapan, mulai perencanaan, pengawasan, dan implementasi.

Desa wisata saat ini memiliki kecenderungan menggunakan konsep ekowisata, dimana pariwisata yang ditawarkan adalah segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan. Pariwisata pedesaan menjadikan masyarakat lebih menjaga keaslian budaya dan alam di desanya untuk dapat mempertahankan minat wisatawan dalam berwisata di desa wisata. Konsep yang digunakan dalam pelibatan atau partisipasi masyarakat adalah konsep *community based tourism* (CBT) yang sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan, dimana masyarakat diberdayakan terlebih dahulu agar mampu mengembangkan potensinya sendiri. Melalui pemberdayaan masyarakat dilatih untuk bisa menolong dirinya sendiri (*self help*), sehingga pada pembangunan desa wisata, masyarakat

dikembangkan dan diberdayakan untuk mampu mengelola desa wisatanya sendiri (A'inun, et.al., 2018).

Pengertian desa wisata dari Pariwisata Inti Rakyat (PIR), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan. Keaslian tersebut berupa kehidupan ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat, kesehatan, arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, seperti; atraksi, akomodasi, makanan dan minuman, serta kebutuhan wisata lainnya (Hadiwijoyo, 2012).

Partisipasi Masyarakat Lokal

Berkembangnya konsep pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism/CBT*) sangat berbeda dengan pengembangan pariwisata pada umumnya (*mass tourism*). Dalam CBT, komunitas merupakan aktor utama dalam proses pembangunan pariwisata, dengan tujuan utama untuk peningkatan standar kehidupan masyarakat (Rahayu, S., 2016). Pengembangan CBT merupakan pendekatan partisipatif agar terbentuk kemitraan antara stakeholder (Demartoto, 2009). CBT merupakan alternatif pengembangan pariwisata yang dianggap lebih menguntungkan masyarakat setempat dan menjamin keberlanjutan pariwisata. CBT juga terkait erat dengan perkembangan kebutuhan manusia untuk mengonsumsi jasa pariwisata yang telah memberikan peluang besar bagi perkembangan industri pariwisata.

Berbagai jenis objek dan atraksi wisata berkembang seiring dengan perkembangan pariwisata global yang mengarah ke bentuk wisata alternatif, seperti wisata budaya, wisata alamiah, dan ekowisata. Salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam pengembangan CBT adalah menitikberatkan pengembangannya pada masyarakat. Masyarakat menduduki posisi sebagai bagian integral yang ikut berperan serta, baik secara subjek maupun objek (Nurhidayati, S.E., 2015). Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, maka upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan pada hahekatnya harus di arahkan pada beberapa hal sebagai berikut: (1) meningkatkan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan; (2) meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan partisipatif masyarakat; (3) meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat; dan (4) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata (Sunaryo, 2013).

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara sadar dan sukarela dalam proses pembangunan yang meliputi empat tahap, yaitu: (1) tahap pengambilan keputusan; (2) tahap pelaksanaan kegiatan; (3) tahap pemantauan dan evaluasi pembangunan; serta (4) tahap pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sebagai perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung-jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

(1) partisipasi dalam pengambilan keputusan; (2) partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan; (3) partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, serta (4) partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan (Theresia, A., et al., 2014). Hal yang penting dalam mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan adanya tiga unsur, yaitu: (1) adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi; (2) adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi; dan (3) adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi (Slamet dalam Theresia, A., et al., 2014).

Partisipasi masyarakat dalam suatu perencanaan pembangunan akan membantu perencanaan itu menjadi lebih terarah dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui partisipasi masyarakat maka penyusunan rencana atau program pembangunan dapat dilakukan dengan penetapan prioritas, sehingga implementasi program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien (Adisasmita, 2013). Masyarakat merupakan pelaku aktif dalam pembangunan kepariwisataan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sendiri dan pembangunan kepariwisataan merupakan aktualisasi dari sistem ekonomi kerakyatan yang mencakup keseluruhan kegiatan lapisan masyarakat sebagai sumber ekonomi kreatif masyarakat (Mulyadi, 2014).

Pemberdayaan Pokdarwis

Desa wisata memiliki pengertian yang lebih khusus dibandingkan pengertian desa. Desa wisata adalah suatu daerah tujuan wisata, disebut pula sebagai destinasi pariwisata yang mengintegrasikan daya

tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, 1993). Keberadaan desa wisata kini banyak dikembangkan dan memiliki daya pikat yang baik. Selain memiliki daya pikat berupa ragam tradisi dan budaya lokal juga didukung pesona alam yang terbentang dari desa satu ke desa yang lain dengan keunggulan masing-masing. Oleh karena itu, perlu pemikiran untuk mengelola potensi desa wisata secara terstruktur dan melembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat lokal yang sangat memahami nilai-nilai keunikan alam dan budaya di wilayahnya.

Keberadaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) memberikan harapan besar bagi penyelenggaraan desa wisata, mengingat fungsi Pokdarwis sebagai salah satu unsur penggerak dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat agar memiliki kesadaran serta terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan desa wisata di wilayahnya. Pokdarwis dapat dibentuk melalui 2 (dua) pendekatan (Rahim, F., 2012), yaitu: *Pertama*, inisiatif masyarakat yang didasari atas kesadaran masyarakat di sekitar destinasi wisata untuk turut serta berperan aktif dalam pengembangan potensi pariwisata setempat; *Kedua*, inisiasi dari instansi terkait bidang inisiasi kepariwisataan di daerah (Dinas Pariwisata Provinsi/Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota) pada lokasi-lokasi potensial baik dari sisi kesiapan aspek kepariwisataan maupun kesiapan masyarakat-nya.

Lingkup kegiatan Pokdarwis yang dimaksud di sini adalah berbagai kegiatan yang dapat diprogramkan dan dilaksanakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pembentukan organisasi

Pokdarwis (Rahim, F., 2012). Lingkup kegiatan tersebut meliputi antara lain: (1) mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan; (2) mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya; (3) mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya; (4) mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sapta Pesona; (5) mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat; serta (6) memberikan masukan-masukan kepada aparat pemerintah dalam mengembang-kan kepariwisataan di daerah setempat.

Terbentuknya komunitas kelompok sadar wisata (Pokdarwis) tentu saja masih memerlukan proses untuk menumbuhkan kesadaran dan kesediaan berhimpun bersama sama mengelola pembangunan dan pengembangan desa wisata di wilayahnya. Kapasitas secara kelembagaan memiliki fungsi yang sangat penting dan didukung sistem manajemen operasional yang memadai, meliputi: (1) mampu menjalankan organisasi secara stabil namun tetap adaptif terhadap dinamika kepariwisataan yang tumbuh dan berkembang; (2) memahami prinsip-prinsip kriteria kecukupan ekowisata;

(3) mampu mengemban tanggungjawab menjaga kelestarian aset wisata alam maupun budaya agar terjamin sustainabilitasnya; (3) mampu dalam mengembangkan dan mengelola manajemen desa wisata yang memberikan layanan wisata terbaik bagi kebutuhan wisata para pengunjung; (4) mampu membangun dan menciptakan branding destinasi yang menimbulkan kesan positif desa wisata di wilayahnya.

Konsep *Community Building*

Community building atau pembangun-an komunitas adalah bidang praktik yang di arahkan pada penciptaan atau peningkatan komunitas di antara individu-individu dalam wilayah regional atau dengan kepentingan bersama (Wikipedia). Strategi *communtty building* dapat membuat perbedaan yang signifikan bahwa banyak kasus dimana warga masyarakat miskin telah berubah secara dramatis keadaan mereka dengan mengorganisir untuk bertanggungjawab atas nasib mereka sendiri (Kinsley, et.al., 1997). Dalam perspektif sosiologi, komunitas diartikan sebagai warga setempat yang dapat dibedakan dari masyarakat lebih luas (*society*) melalui kepentingan bersama (*a community of interest*) atau tingkat interaksi yang tinggi. Para anggota komunitas mempunyai kebutuhan bersama (*common needs*). Jika tidak ada kebutuhan bersama, itu bukan suatu komunitas (Ife dalam Nasdian, 2014). Komunitas (*community*) bisa dipahami sebagai kelompok yang lebih spesifik dari masyarakat secara lebih luas. Pengertian lain tentang komunitas dikemukakan bahwa komunitas adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah geografi dengan batas-batas tertentu dan memiliki ikatan

sosial serta psikologis satu dengan yang lain dan dengan tempat dimana mereka tinggal (Mattessich dan Monsey dalam Veriasa dan Waite, 2018). Berdasarkan pengertian ini komunitas dapat dipahami sebagai masyarakat didalam batas-batas wilayah geografis, seperti masyarakat dalam satu desa tertentu.

Community building dipahami sebagai bagian dari *community development* yakni kegiatan pengembangan masyarakat yang diselenggarakan secara sistematis, terencana, dan di arahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik (Budimanta dalam Rahman, 2009). *Community building* ini dalam implementasi di arahkan pada penekanan aspek *capacity building*, yaitu kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien, dan terus menerus (Milen, 2004). Robinson dan Green (2011) memandang pengembangan komunitas (*community building*) sebagai sekelompok orang bekerja bersama-sama di dalam tatanan masyarakat pada keputusan bersama untuk menginisiasi sebuah proses perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan mereka. UNDP (*United Nations Development Program*) dan CIDA (*Canadian International Development Agency*) memberikan pengertian peningkatan kapasitas (*capacity building*) sebagai proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai *core functions* (Milen, 2004).

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) perspektif dan fokus serta masalah penelitian melihat fenomena sosial yang terjadi sebagai gejala sistematis; (2) bahwa untuk memperoleh data penelitian dilakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan aktor; (3) dalam kenyataannya, hubungan-hubungan individu dengan lingkungan sosialnya juga berhubungan dengan bahan dokumentasi dan lainnya sebagai aktivitas masyarakat. Subjek penelitian partisipan meliputi kepala desa dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) masing-masing desa yang dijadikan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yaitu merupakan suatu proses mendapatkan data informan secara induktif. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengutamakan proses intepretatif makna. Penelitian dilaksanakan di dua lokasi, yaitu; Desa Sumber Agung (Desa Wisata Alas Sumur) Kecamatan Pujer dan Desa Karangmelok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.

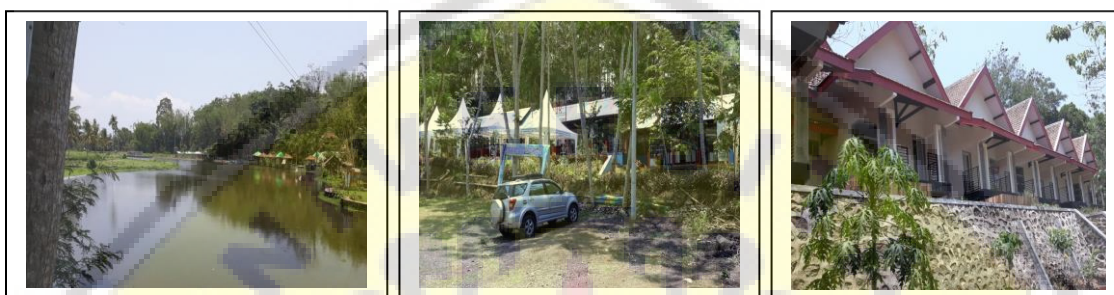
PEMBAHASAN

Desa Wisata Alas Sumur

Desa wisata Alas Sumur berkedudukan di kecamatan Pujer Bondowoso. Desa wisata Alas Sumur dikenal atau di branding dengan nama "Almour" agar mendapat kesan tersendiri dalam ingatan para pengunjung. Desa wisata Almour dirintis sejak tahun 2015 mulai menata objek dan atraksi wisata serta fasilitas pendukung yang kemudian baru diresmikan pada tahun 2017. Kawasan wisata ini merupakan wisata rekreatif berupa taman wisata air, baik untuk aktifitas memancing, sepeda air, terapi

ikan, *flying fox*, kuliner dan lainnya. Fasilitas yang tersedia cukup lengkap dan dalam kondisi baik, berupa pintu tiket, jalan lingkungan dan jembatan yang sudah di paving, gasebo, stan kuliner UKM, lahan parkir yang luas (bisa untuk *camping* atau pentas seni), *cottage*, kantin, mushola, dan fasilitas lainnya. Pemandangan yang disajikan cukup indah dengan lingkungan

alamiahnya. Letak objek wisata dikembangkan dari lahan yang tidak produktif berada diantara kaki bebukitan sehingga memiliki sumber air berupa telaga alam yang dimanfaatkan untuk keperluan pertanian. Setelah dilakukan penataan terciptalah objek wisata yang menarik dan cukup menawan.



Gambar 1. Objek Wisata Air, Parkir dan Stan Kuliner, *Cottage*

Desa wisata Almour dikategorikan sebagai desa wisata yang sudah “berkembang” karena sudah terdapat aktivitas pengunjung yang melakukan kegiatan wisata. Tingkat kunjungan meningkat terutama pada hari minggu dan hari libur serta pada hari-hari besar keagamaan. Geliat wisata Almour tidak terlepas dari tokoh penggagas yakni kepala desa Sumber Agung yaitu Bapak Totok Haryanto dan dalam pengelolaan wisata Alas Sumur ditangani oleh Pokdarwis desa wisata Almour yang di ketuai oleh saudara Mohamad Yani. Peran Pokdarwis Almour dalam melibatkan partisipasi penduduk lokal mendapat dukungan dari tokoh warga lokal baik dalam pertemuan formal maupun dalam pertemuan keagamaan yang dilakukan secara reguler/rutin. Awal pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas kuliner dilakukan dengan mengundang segenap warga yang memiliki kemampuan dibidang kuliner diberikan kesempatan memanfaatkan

stan yang tersedia, sementara fasilitas listrik masih ditanggung oleh BUMDES. Peluang usaha lain dibidang pariwisata bagi penduduk lokal selain bidang kuliner, juga diberdayakan untuk menghasilkan produk-produk kreatif sebagai buah tangan berupa souvenir. Keberadaan *cottage* akan membuka peluang kerja untuk perawatan fasilitas dan pelayanan tamu yang menginap, juga didirikan rumah kreatif berupa sanggar seni bagi warga lokal yang memiliki minat berkegiatan seni. Personil Pokdarwis secara bergantian diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau forum-forum pembinaan guna meningkatkan pengetahuan, wawasan serta kemampuan personalitas sebagai komunitas sadar wisata dan penggerak partisipasi penduduk lokal.

Desa Wisata Karangmelok

Desa Karangmelok terletak di kecamatan Tamanan Bondowoso yang saat ini sedang merintis

pengembangan desa wisata dengan memanfaatkan potensi desa baik berupa lahan pertanian maupun perternakan yang dimiliki oleh mayoritas penduduk desa. Produk wisata yang akan dikembangkan berupa pertanian organik dan pengolahan limbah peternakan sebagai pupuk organik. Selain itu, objek wisata yang ingin segera direalisasikan

adalah wisata edukasi berupa taman rekreasi dan bermain bagi segmen anak-anak seperti tingkat PAUD dan Taman Kanak-kanak. Untuk pengembangan wisata edukatif ini, Bapak kepala desa (Kuswijaya) sebagai inisiator memiliki gagasan untuk membranding wisata edukasi ini dengan brand “KAVE” yaitu “Karangmelok Village Education”.



Gambar 2. Lokasi serta Pembangunan Fasilitas Edukasi dan Rekreasi

Penyelenggaraan desa wisata ini adalah merupakan salah satu unit usaha BUMDES desa Karangmelok. Pelaksana usaha wisata yang dirintis pengembangannya ini diserahkan kepada kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Karangmelok yang baru dibentuk. Pokdarwis merupakan organisasi yang dibentuk secara formal dan memiliki legalitas memikul tugas dan tanggungjawab yang cukup besar dalam menahodai perjalanan desa wisata ke depan menuju desa wisata yang berkembang. Oleh karena itu, penguatan-penguatan kelembagaan terus ditingkatkan agar *sense of belonging* tumbuh serta memberikan spirit bagi kinerja jajaran pengurus Pokdarwis. Manajemen Pokdarwis harus memiliki kemampuan untuk mengeksekusi segala kebijakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pengembangan desa wisata di wilayahnya. Tantangan yang tidak mudah bagi Pokdarwis adalah mendekati, mengajak dan melibatkan penduduk lokal agar dapat

berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata di wilayahnya. Menumbuhkan kebersamaan, mendorong kemandirian dalam mengembang-kan gagasan-gagasan kreatif untuk penguatan aspek sosial (*social capital*), penguatan ekonomi lokal (*finacial capital*), dan penguatan sadar lingkungan (*cultural and natural capital*). Apabila kapasitas dan kapabilitas Pokdarwis sebagai kelompok sadar wisata betul-betul mencukupi bahkan memadai, maka peluang pemberdayaan partisipasi lokal akan semakin besar.

Strategi Community Building pokdarwis

Berdasarkan pada level pengembang-an desa wisaata di dua lokasi penelitian berbeda, dimana desa wisata Alas Sumur sudah berjalan sejak 2 (dua) tahun dan dikategorikan sebagai desa wisata yang sudah berkembang. Sementara desa wisata Karangmelok masih berada pada taraf

rintisan, sehingga kelembagaan Pokdarwis masing-masing kedua desa juga berbeda penguatannya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang membentuk kemandirian-nya. Pokdarwis desa wisata Alas Sumur selama berjalan 2 tahun jumlah anggotanya berkurang melalui proses alami, disebabkan belum mantapnya kesiapan untuk menumbuhkan kasadaran dalam aktivitas Pokdarwis yang bernuansa pengabdian. Sementara Pokdarwis di desa Karangmelok relatif masih baru terbentuk sehingga jumlah keanggotaan masih utuh.

Agar proses pemberdayaan Pokdarwis dapat berjalan secara efektif, maka dalam pembentukan dan rekrutmen keanggotaan Pokdarwis perlu dipastikan telah memahami ketentuan persyaratan (secara ideal) keanggotaan Pokdarwis, yaitu:

- 1) Bersifat sukarela;
- 2) Memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan;
- 3) Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap pariwisata;
- 4) Mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun tidak langsung;
- 5) Jumlah anggota setiap Pokdarwis minimal 15 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Pokdarwis Almour dapat dipahami bahwa dengan penerimaan finansial oleh anggota Pokdarwis berdasarkan persentase dari penerimaan tiket masuk (desa wisata Alas Sumur) yang bersifat fluktuatif, sehingga bagi anggota yang tidak memiliki pekerjaan yang memberikan

pendapatan memadai akan mengalami kesulitan apabila hanya mengandalkan penerimaan dari penghasilan tiket desa wisata. Hal ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan desa wisata yang mampu menghasilkan penerimaan finansial yang memadai.

Terlepas dari kendala kesejahteraan Pokdarwis bagi pengembangan desa wisata, Namun kembali kepada tujuan pembentukan Pokdarwis sebagai penggerak pembangunan desa wisata di wilayahnya, perlu penguatan kelembagaan dengan strategi *community building*. Strategi *community building* diharapkan dapat membuat perbedaan yang signifikan bagi pengembangan Pokdarwis di desa wisata Alas Sumur dan desa wisata Karangmelok. Demikian halnya dalam pengembangan kapasitas (*capacity building*) memiliki dimensi, fokus, dan tipe kegiatan. Pada pengembangan SDM, fokus kepada personil atau keanggotaan yang profesional dan kemampuan teknis. Sedangkan tipe kegiatan adalah seperti misalnya, praktik langsung peningkatan kemampuan individu dan kelompok.

Prinsip-prinsip *community building* sebagaimana konsepsi *Ford Institute of Community Building*, maka strategi *community building* Pokdarwis dapat dirinci sebagai berikut: (1) Pentingnya tim Pokdarwis untuk mengadakan pendekatan kepada stakeholder desa wisata, seperti: (a) stakeholder inti, yaitu masyarakat lokal atau penduduk lokal untuk memberikan pemahaman tentang desa wisata; (b) stakeholder kunci, yaitu pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana fisik, finansial, manajemen, juga regulasi yang diperlukan; (c)

stakeholder pendukung, yaitu perguruan tinggi melalui program penelitian, pengabdian maupun KKN mahasiswa serta program desa binaan; (2) Setelah memperoleh pemahaman dan pengetahuan, Pokdarwis harus mempraktikkan apa yang telah diketahui, dan bangunlah dengan apa yang sudah dimiliki (fasilitas dukungan dari stakeholder); (3) Pokdarwis hendaknya menempatkan dirinya ke dalam cara pandang orang lain atau kelompok lain dalam melihat dunia kepariwisataan; (4) Pokdarwis senantiasa menjaga komunitasnya agar selalu berada di dalam pusat kegiatan, memiliki fokus yang konsisten dan konsekuen dalam pengembangan desa wisata.

Mengacu prinsip-prinsip *community building* tersebut, perlu memperhatikan praktik-praktik *community building*, seperti: (1) Sadar akan pentingnya memperoleh informasi dari berbagai sumber dan menjadikannya sebagai proses dan bahan pembelajaran; (2) Pelibatan tim Pokdarwis dalam setiap kegiatan guna menjaga soliditas, sinergitas, serta interaksi secara berkelanjutan; (3) Membangun dan mengembangkan ketrampilan; (4) Merencanakan bersama; (5) Melakukan perubahan; (6) Mensyukuri dan merenungkan apa yang sudah dicapai serta adakan evaluasi untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya.

A. KESIMPULAN

Hasil wawancara dengan ketua Pokdarwis desa wisata Alas Sumur saudara Muhamad Yani yang memiliki latar belakang pendidikan yang mencukupi dan saat ini juga berstatus sebagai guru di sekolah Aliyah. Sebagai ketua Pokdarwis telah menceritakan apa yang dialami selama

perintisan wisata Almour (sejak 2015). Berdasarkan informasi yang disampaikan dapat dipahami bahwa ketua Pokdarwis desa wisata Almour telah mampu membentuk kedewasaan dan kemandirian sikap dalam memimpin Pokdarwis dan sudah mendekati kesesuaian dengan praktik-praktik *community building*.

Daftar Pustaka

- A'inun N.F., Krisnani, H., Darwis, R.S., (2018). Pengembangan Desa Wisata Melalui Konsep Community Based Tourism, *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 2, No. 3, ISSN 2442-4480; 301-444.
- Arida, N.S., (2016). *Dinamika Ekowisata Tri Ning Tri di Bali: Proses Pelibatan Masyarakat, Perkembangan Produk, dan Strategi Pengembangan*, Denpasar: Pustaka Larasan bekerjasama dengan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana.
- Damanik, J., Kusworo, H.A., Raharjana, D.T., (2005). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata: Dari Konsep Menuju Implementasi*, Yogyakarta: Pusat Studi Pariwisata dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
- Demartoto, A., (2009). *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Hermawan, H., (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal, *Jurnal Pariwisata*, Vol. III, No. 2; 105-117.

- Mastika I.K., Yuswadi H., Budihardjo A., Poernomo D., (2018). Local Indigenous Branding : Bali Ecological Tourism Village, *International Journal of Scientific and Research Publication*, 8(1), 211-218.
- Mastika, I.K., Sasongko, Pramono, R.E., Julianto, D.E., Wahyuni, S., (2019). Adopsi Sistem E-Commerce sebagai Model Layanan Pengunjung Desa Wisata Di Kabupaten Bondowoso. *JUMPA*, Vol. 2 No. 5, Jurnal Magister Pariwisata. Universitas Udayana.
- Muntu, A.W., Wiranatha, A.S., Arida, N.S. (2018). Analisis Partisipasi Komunitas Lokal Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota Tua Jakarta, *JUMPA* Volume 4 Nomor 2, Januari 2018, Jurnal Magister Pariwisata, Universitas Udayana.
- Nasdian, F.T., (2014). *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurhidayati, S.E., (2015). Studi Evaluasi Penerapan Community Based Tourism (CBT) sebagai Pendukung Agrowisata Berkelanjutan, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 28, NO. 1, 2015: 1-10.
- Nuryanti, (1993). Concept, Perspective and Challenges, *Makalah* bagian dari Laporan Konferensi Internasional Mengenai Pariwisata Budaya, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pakpahan, R., (2018). Implementasi Prinsip Pariwisata Berbasis Komunitas di Desa Wisata Nglinggo, *JUMPA* Volume 05, Nomor 01, Juli 2018, Jurnal Magister Pariwisata, Universitas Udayana.
- Rahayu, S., Dewi, U., Fitriana, K.N., (2016). Pengembangan Community Based Tourism sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 21, No. 1, April 2016: 1-13.
- Rahim, F., (2012). *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Jakarta: Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- Robinson, J.W., Green, G.P., (2011). *Intriduction to Community Development Theory, Practise, and Service-Learning*, SAGE Publication Inc. USA.
- Sastrayuda, G.S., (2010). Konsep Pengembangan Desa Wisata. *Hand Out* Mata Kuliah Concept Resort and Leisure, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort and Leisure, file://Uswers/TOSHIBA-PC/Document/Branding.
- Sunaryo, B., (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media.
- Theresia, A., Krisnha, A., Nugraha, P., Mardikanto, T., (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Sidiq, A.J., Resnawaty, R., (2017). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat, *Prosiding KS: Riset &*

PKM, Vol. 4, No. 1, ISSN 2442-4480; 1-140.

Veriasa, T.O., Waite, M., (2018).
*Memahami Konsep
Pembangunan Komunitas,*
Bogor: Pusat Pengkajian
Perencanaan dan Pengembangan
Wilayah (P4W) IPB dan
University of Hawaii System.



